



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR  
POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR  
IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN**



# PENGATURAN PMK 112/2022 std 136/2023

2

s.d. 30 Juni 2024

- **NIK dan NPWP 16 digit** digunakan secara terbatas dalam layanan administrasi perpajakan. [Ps 2 (6)]
- **NPWP cabang** masih dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. [Ps 9(3) dan 10 (4)]
- **WP baru/ditetapkan jabatan** diberikan [Ps 10 (1)]:  
WP OP Pdd : Aktivasi NIK dan NPWP 15 digit  
WP non OP Pdd : NPWP 16 digit  
WP cabang : NITKU dan NPWP cabang



Per 1 Juli 2024

- **WP OP Pdd** menggunakan **NIK sebagai NPWP** [Ps 11 (1)a]
- **WP non OP Pdd** menggunakan **NPWP 16 digit** [Ps 11 (1)a]
- **WP cabang** menggunakan **NITKU** [Ps 11 (1)b]
- **WP OP Pdd** dengan status pemanfaatan “**belum padan**”, tetap dapat memanfaatkan layanan perpajakan setelah melakukan pemanfaatan. [Ps 11 (1a)]

**Layanan administrasi pihak lain** harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit. [Ps 11 (1)c]



**Direktur Jenderal Pajak** atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan system administrasi pihak lain dimaksud [Ps 11 (3)]

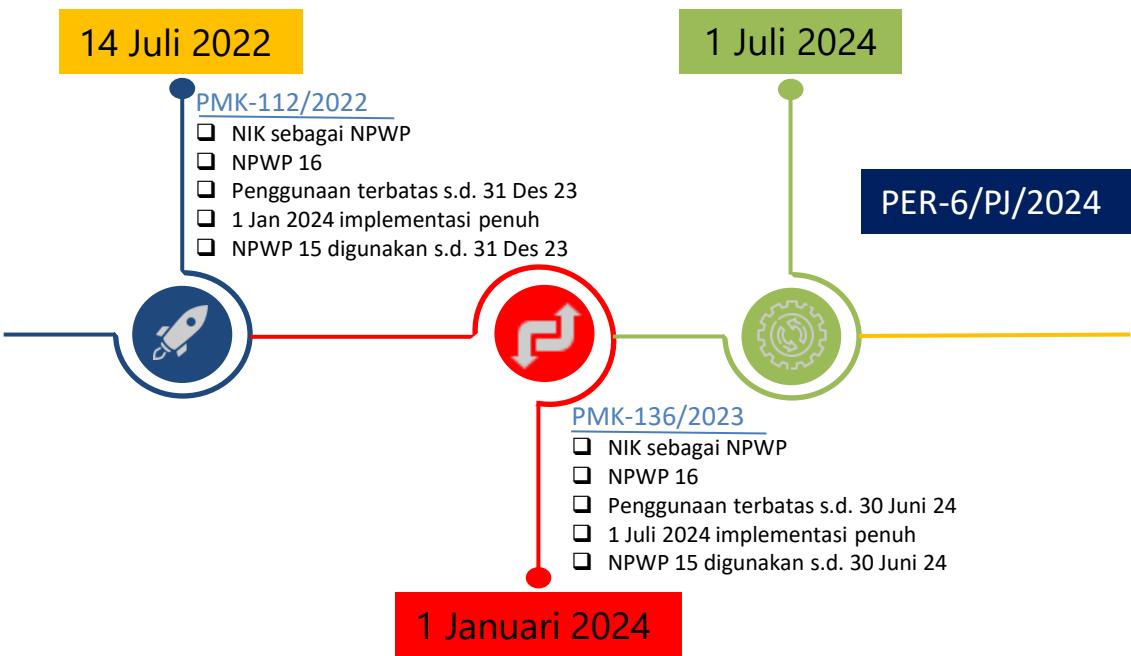
# PERDIRJEN NOMOR PER-6/PJ/2024

memberikan:

- kepastian hukum** serta **kemudahan pelayanan** Wajib Pajak dan pihak lain
- kecukupan waktu** para pihak menyesuaikan sistem administrasi

## melaksanakan Pasal 11 ayat (3) PMK-112/136:

"Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan system administrasi pihak lain dimaksud"



## Sistematika PERDIRJEN

3

Pasal 1	Ketentuan Umum
Pasal 2	<ul style="list-style-type: none"><li>Sejak 1 Juli 2024 WP menggunakan NPWP 16 dan Pihak Lain menyesuaikan sistemnya.</li><li>7 layanan administrasi yang dapat menggunakan NPWP 16 dan NITKU sejak 1 Juli 2024</li><li>Layanan tambahan lain akan diumumkan secara bertahap</li><li>Layanan lainnya masih menggunakan NPWP 15</li></ul>
Pasal 3	Pihak Lain yang belum siap menyesuaikan sistem NPWP 16, diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2024
Pasal 4	<ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan akan disesuaikan secara bertahap dengan mencantumkan NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU.</li><li>Keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan dengan NPWP 15 masih sah dan berlaku</li><li>Contoh format penyesuaian pencantuman NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU di Lampiran</li></ul>
Pasal 5	WP daftar baru/diberikan NPWP jabatan tetap diberikan NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU
Pasal 6	Pemberlakuan Perdirjen mulai 1 Juli 2024

Sejak 1 Juli 2024



NPWP ORANG PRIBADI  
penduduk



NPWP BADAN, Instansi  
Pemerintah & ORANG  
PRIBADI bukan penduduk



NPWP CABANG

NIK

16 Digit  
Angka

NITKU

Pasal 2

TERGANTUNG  
APLIKASI

7 Layanan siap NPWP 16 dan NITKU

Pasal 2

Tambahan layanan akan diumumkan secara  
bertahap kepada masyarakat

Layanan lain masih menggunakan NPWP 15

PENYESUAIAN SISTEM  
**PIHAK LAIN**  
FORMAT NPWP 16 DIGIT

SAMPAI  
DENGAN

31 DESEMBER  
2024



Penyesuaian format  
keputusan, ketetapan,  
formulir, dan dokumen  
perpajakan

Pasal 4

NPWP :...../.....  
NITKU :.....

CONTOH DI LAMPIRAN

1. Aktivasi NIK>NPWP
2. Diberikan NPWP 15



Masih menggunakan  
NPWP 15 Digit, memiliki  
kekuatan hukum yang  
sama (tetap sah dan berlaku)



1. Diberikan NPWP 15
2. Diberikan NPWP 16



1. Diberikan NPWP 15
2. Diberikan NPWP 16  
(pusat)

WP DAFTAR  
BARU/ JABATAN

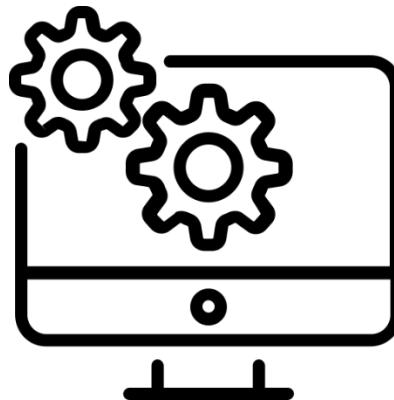
diberikan NITKU (di tempat tinggal  
atau tempat kedudukan dan cabang)

Pasal 5

# Layanan Administrasi yang dapat menggunakan NPWP 16-NITKU sejak 1 Juli 2024

1. pendaftaran Wajib Pajak (**e-Registration**);
2. akun profil Wajib Pajak pada DJP Online;
3. informasi konfirmasi status Wajib Pajak (**info KSWP**);
4. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 (**e-Bupot 21/26**)
5. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (**e-Bupot Unifikasi**);
6. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (**e-Bupot Instansi Pemerintah**); dan
7. pengajuan keberatan (**e-Objection**).

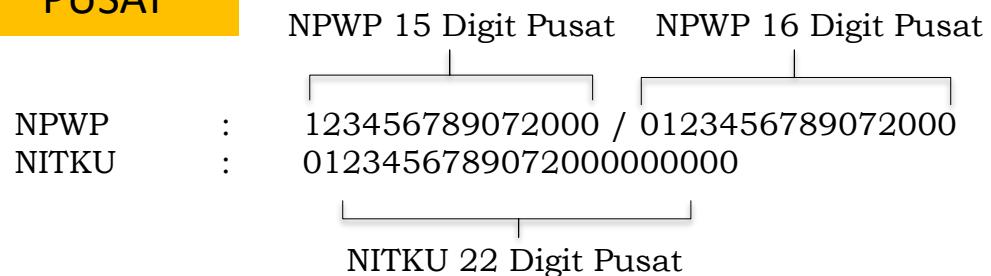
TETAP BISA DIAKSES dengan  
NPWP 15 Digit



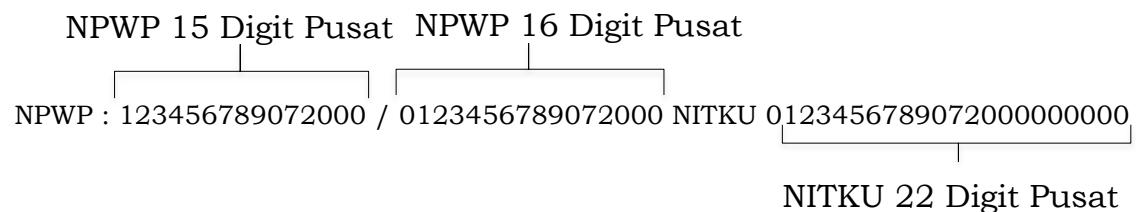
Jenis dan penjelasan layanan administrasi  
&  
penambahan layanan administrasi  
  
diumumkan kepada masyarakat secara bertahap

# Contoh Pencantuman NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU

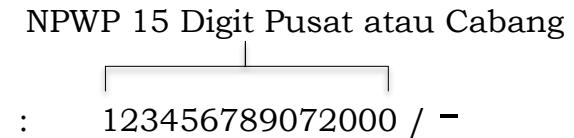
## PUSAT



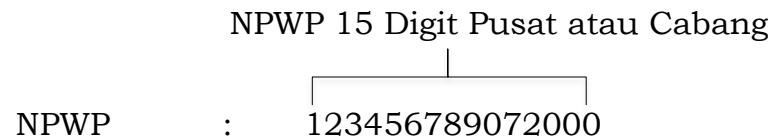
atau



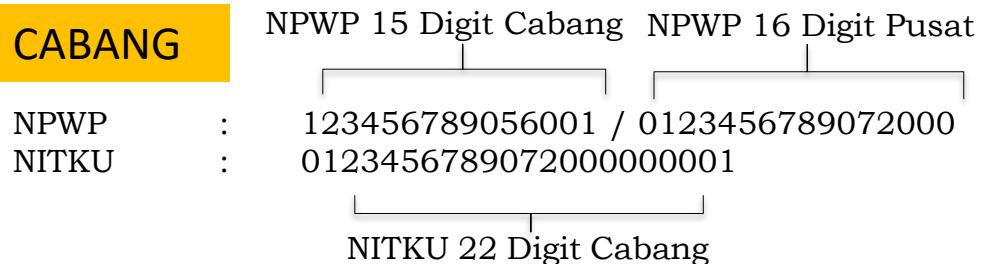
## WP OP Belum Padan



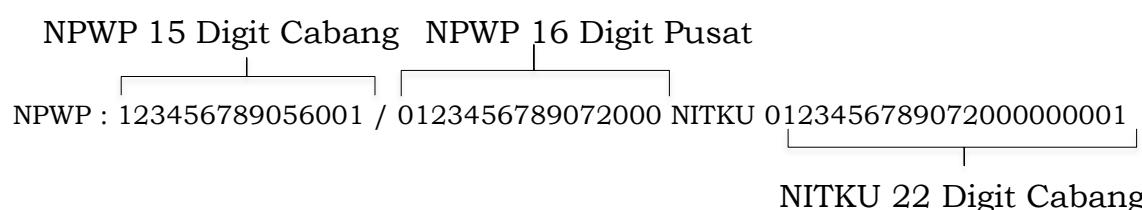
NPWP : -  
atau



## CABANG



atau



**PENULISAN**  
**NPWP 15 DIGIT**  
**NPWP 16 DIGIT**



**menyesuaikan** dengan kondisi sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pihak Lain



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200